

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Erwin, 2006, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang, Andalas University Press.
- Kurnia Waman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik-Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Padang, Andalas University Press.
- Rosnidar Sembiring, 2019, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana.

B. JURNAL .

- Adek Chandra, 2022, "Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat", dalam *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2.
- Feronika dkk., 2019, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung", dalam *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, No. 02.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, 2011, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Nova Yarsina, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi", dalam *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Prihatini Purwaningsih dkk., 2017, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", dalam *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 1.
- Rosmidah, 2010, "Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya", dalam *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4.
- Selfi Mahat Putri, 2021, "Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau", dalam *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 05, No. 2.

Siti Raga Fatmi, 2018, “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, dalam *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3.

Syamsuddin Anas dkk., 2019, “Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci”, dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No 1.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, 2010, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Tri Susilaningsih, 2019, “PTSL Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1.

Velly Farhana Azra dkk., 2017, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2.

Yesi Fitria Sari, 2024, “Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat”, dalam *Jurnal Ideologi dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 1.

Yusnita Rachma, 2019, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

D. INTERNET

- Admin Palanta, *Nagari Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam*, <https://langgam.id/nagari-maninjau-tanjung-raya-kabupaten-agam> diakses pada 14 Januari 2025
- Afrida, *Memahami Pentingnya Tanah Ulayat bagi Masyarakat Minangkabau*, <https://kumparan.com/afrida-afrida/memahami-pentingnya-tanah-ulayat-bagi-masyarakat-minangkabau-23TJJLswRL1> diakses pada 29 Juli 2024
- Dadi Suryandi, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id> diakses pada 20 November 2024
- Philipus H. Sitepu, *syarat materiil dan formil akta notaris, apa saja ?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris-apa-saja-lt601406afbaaa9/> diakses pada 5 Mei 2024
- Rahmi Murniwati, *Mengenal Tanah Ulayat Dalam Adat Minangkabau*, <https://weread.id/2023/05/26/mengenal-tanah-ulayat-dalam-adat-minangkabau/> diakses pada tanggal 16 Mei 2024
- Ridho Afriandedy, *Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, <https://pta-banten.go.id/publikasi/arsip-artikel/846-problematika-hak-milik-atas-tanah-ridho-afriandedy-s-h-i-lc-m-h> diakses pada 10 Agustus 2024

